

12-11-2021

Arah Kebijakan Militer Arab Saudi di Bawah Komando Mohammed Bin Salman (MBS) Menghadapi Visi Saudi 2030

Muhammad Ali
Universitas Indonesia, 73alimuhammad@gmail.com

Muhammad Syaroni Rofii Mr.
School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia, muhammadsyaroni@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis>



Part of the [Near and Middle Eastern Studies Commons](#)

Recommended Citation

Ali, Muhammad and Rofii, Muhammad Syaroni Mr. (2021) "Arah Kebijakan Militer Arab Saudi di Bawah Komando Mohammed Bin Salman (MBS) Menghadapi Visi Saudi 2030," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*: Vol. 8: No. 2, Article 4.

DOI: 10.7454/meis.v8i2.137

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis/vol8/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Middle East and Islamic Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Arah Kebijakan Militer Arab Saudi di Bawah Komando Mohammed Bin Salman (MBS) Menghadapi Visi Saudi 2030

Cover Page Footnote

Terima kasih kepada MEIS UI, Semoga selalu menjadi yang terbaik.

ARAH KEBIJAKAN MILITER ARAB SAUDI DI BAWAH KOMANDO MOHAMMED BIN SALMAN (MBS) MENGHADAPI VISI SAUDI 2030

Muhammad Ali, Muhammad Syaroni Rofii

Sekolah Kajian Strategik dan Global Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah
Universitas Indonesia

E-mail: 73alimuhammad@gmail.com, muhammadsyaroni@ui.ac.id

Abstract

Saudi Arabia's big ambition in Saudi Vision 2030 which has been launched since 2016 to diversify the economy is affected by the country's political policies. Saudi Arabia's involvement in the political arena in the Middle East has implications for the economy of this oil-rich country. Saudi Arabia actually wants to get out of the mire of regional conflicts and find a way to save face under the leadership de facto of Prince Mohammed bin Salman (MBS). MBS's main goal is the success of Saudi Vision 2030 rather than maintaining his regional hegemony under the shadow of the United States. MBS's policies, which are supported by the United States and the West in regional conflicts in Syria, Yemen, Libya, Iraq, and Qatar, have proven to be inconsistent with expectations because they are hampered by the activeness and effectiveness of Iranian proxies. What should be the direction of Saudi Arabia's military policy in the Middle East region under the command of MBS for the success of Saudi Vision 2030. As Minister of Defense, MBS can regulate the rhythm of Saudi Arabia's military policy while maintaining its hegemony in a region with military independence and reducing the intensity of military involvement in conflict zones regional government and seeks to normalize relations with Iran and Turkey so that they can focus on the Saudi vision 2030 program.

Keywords: Vision, Saudi Arabia, military, hegemony, regional.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 1970 telah mencoba untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak sebagai penyumbang utama Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dalam implementasinya tidaklah berjalan mulus, karena minyak masih menjadi komoditi primadona bagi Arab Saudi dengan menyumbang sebesar 73% dari pendapatan negara. Walaupun minyak

dunia terus mengalami fluktuatif harga, Arab Saudi masih belum bisa sepenuhnya lepas dari ketergantungan pada minyak. Sampai akhirnya sebuah ide brilian dan sangat ambisius yang dilakukan oleh Raja Salman bin Abdulaziz berupa Visi Saudi 2030 dan didukung penuh oleh Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dengan program diversifikasi energi.

Pada tanggal 25 April 2016, di canangkan Visi Arab Saudi 2030 agar Arab Saudi bisa mengurangi ketergantungan dari minyak dan mendiversifikasi ekonomi serta mengembangkan sektor publik berupa kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan pariwisata. Kerajaan Arab Saudi yang dikenal konservatif menjadikan visi 2030 sebagai kunci dari reformasi ekonominya dengan mengurangi ketergantungan dari minyak. MBS sendiri merupakan motor perubahan Arab Saudi dari konservatif menjadi lebih moderat. Dengan Visi Saudi 2030, MBS yakin ini akan membawa Arab Saudi menjadi negara yang lebih terbuka dan modern (medcom.id, 2018). Visi Saudi 2030 memiliki tiga pilar utama yaitu; *pertama*, menjadikan Arab Saudi sebagai jantung dunia Arab dan Islam. *Kedua*, membangun diterminasi sebagai kekuatan investasi global dan *ketiga*, menjadikan Arab Saudi sebagai perantara bagi tiga benua yakni, Asia, Eropa dan Afrika (project-syndicate.org, 2021).

Dengan modal kekuatan ekonomi dan kekuatan militer yang sangat besar serta berpengaruh di kawasan regional, membuat Arab Saudi berambisi besar untuk menancapkan hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Pada kenyataannya walaupun mempunyai

kekuatan ekonomi dan militer ternyata tidak serta-merta membuat Arab Saudi menjadi superior di kawasan, bahkan didukung penuh oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dinamika geopolitik di Timur Tengah tidak sesuai harapan Arab Saudi, contohnya dalam konflik di Yaman, sampai saat ini Arab Saudi belum dapat melumpuhkan kekuatan Houthi, juga pada konflik di Suriah, kelompok oposisi yang didukung Arab Saudi sampai sekarang belum bisa menggulingkan rezim Bashar al-Asaad. Selain terlibat konflik di yaman dan Suriah, boikot Arab Saudi dan beberapa anggota GCC terhadap Qatar ternyata tidak membuat Qatar makin lemah malah sebaliknya semakin kuat dan membuat Arab Saudi khawatir dengan kerjasama Qatar dengan Iran dan Turki. Selanjutnya rivalitas Arab Saudi dengan Iran di kawasan semakin meruncing dan membahayakan di kawasan. Ditambah lagi dengan kemandirian militer Iran dan kerjasama pertahanan Iran dengan Rusia dan China membuat pertahanan Iran semakin kuat dan disegani. Selain keterlibatan Arab Saudi dalam beberapa konflik di kawasan persaingan dan perbedaan pandangan politik antara Arab Saudi dan Turki juga selalu menimbulkan gejolak politik kedua negara dan berdampak pada geopolitik di kawasan regional.

Sejak terpilihnya Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-46 menggantikan Donald Trump membuat pergeseran peta politik di Timur Tengah menjadi drastis, dari *unilateralisme* menuju *multilateralisme*, sehingga akan memperlihatkan sebuah politik yang rasional, dialogis, mencari titik temu di antara bermacam kepentingan. Dengan demikian Biden akan mengedepankan diplomasi dengan perundingan dengan prinsip saling menghormati (*mutual respect*) dan saling menguntungkan (*mutual interest*) (berkas.dpr.go.id, 2021). Pada tanggal 4 Februari 2021 Joe Biden mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakhiri dukungan untuk operasi militer di Yaman, koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi. Biden juga berjanji untuk menhidupkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tentang kesepakatan nuklir Iran. Implikasi dari keputusan Biden ini berpengaruh pada dinamika politik dan kebijakan Arab Saudi di kawasan Timur Tengah (mediaindonesia.com, 2021).

Keputusan Biden yang berlawanan dengan pendahulunya Donald Trump tentang Timur Tengah, membuat MBS mulai melunak terhadap kebijakan politik terhadap negara-negara pesaingnya. Untuk mengantisipasi kebijakan Biden tersebut, MBS jauh-jauh hari sudah memberikan

kelonggaran untuk pesawat komersial Israel untuk melintas di wilayah Arab Saudi dan mengadakan pertemuan dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Selain itu Arab Saudi bersama Mesir, Bahrain, dan UEA mencabut blokade terhadap Qatar. Selanjutnya diplomasi yang intens untuk pemulihan hubungan atau normalisasi dengan Turki dan Iran.

Dari rangkaian dinamika perkembangan politik di Timur Tengah ini, penulis melihat arah kebijakan MBS, apakah tetap bersaing mempertahankan hegemoninya di kawasan dengan konsekuensi kerugian dan kekalahan dalam perang proksi dengan Iran atau menatap lebih realistis untuk fokus pada ambisi besar Visi Saudi 2030. Kedua pilihan ini, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengerahan militer baik persenjataan dan personil Arab Saudi yang sangat bergantung dengan AS dan Barat. Hal ini tentu saja merubah arah kebijakan militer Arab Saudi di bawah komando MBS dalam melihat masa depan Arab Saudi di kawasan dengan ambisi MBS pada suksesnya Visi Saudi 2030.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu penulis melakukan eksplorasi untuk dapat memahami dari makna perilaku individu atau kelompok yang menggambarkan

permasalahan sosial dan permasalahan kemanusiaan. Penelitian kualitatif bertujuan agar dapat memahami (*to understand*) dan dapat menafsirkan (*to interpret*) dari perilaku atau interaksi sosial (Creswell; 2012). Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan makna (*meaning*), proses, dan konteks sebuah atau peristiwa sosial yang sedang diamati (Bakry; 2016).

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri oleh James N. Rosenau, ia berpendapat bahwa pada hakekatnya kebijakan luar negeri merupakan suatu mekanisme adaptasi sebuah negara dalam memahami perubahan-perubahan di lingkungannya selanjutnya menjadi pemikiran oleh pembuat kebijakan untuk bertindak agar memaksimalkan peluang dan meminimalkan resiko berdasarkan pada persepsi terhadap lingkungannya. Kebijakan luar negeri mencakup sikap dan aktivitas semua masyarakat secara nasional dan terorganisir untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari lingkungan internasional. Pemerintah bertugas sebagai pembuat kebijakan untuk melindungi dan mempertahankan seluruh aspek yang tidak diharapkan. Tindakan pemerintah tersebut harus berorientasi dan bertujuan serta perhitungan untuk kepentingan nasional.

Menurut Marijke Breuning. Teori kebijakan luar negeri umumnya digunakan sebuah negara untuk melihat langkah dan arah dalam menyikapi isu dan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan luar negerinya. Menurut Breuning, teori kebijakan luar negeri adalah sebuah bentuk totalitas kebijakan sebuah negara dalam berinteraksi dengan negara-negara tetangga di luar dari batas teritorial tersebut (Marijke Breuning, 2020). Dalam hubungan dunia internasional kebijakan luar negeri dapat digunakan sebagai alat memahami sebuah negara dalam perilaku negara tersebut dengan negara lain. Kebijakan luar negeri, secara tradisional adalah sebuah kebijakan luar negeri yang difokuskan pada upaya mempertahankan, menjaga keamanan, dan meningkatkan kekuatan pertahanan suatu negara (Marijke Breuning; 2007).

Dalam penelitian ini tingkat analisis negara bangsa dapat dilihat pada hubungan internasional berdasarkan pada dominasi oleh perbuatan atau perilaku negara bangsa. Dapat juga dikatakan bahwa kita harus belajar dalam proses membuat keputusan tentang hubungan internasional berupa politik luar negeri sebuah negara bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh (Waritsa Yolanda, 2020). Pada penelitian ini penulis melihat fakta-fakta dan dikaitkan pada karakteristik dan nilai-nilai

Kerajaan Arab Saudi merupakan dasar sebuah sebab hubungan dengan negara-negara lainnya diwarnai dengan persepsi ancaman dan permusuhan yang dapat menggiring pada sikap dan tindakan yang lebih jauh yaitu pertempuran. Penulis melihat bahwa Arab Saudi di bawah kepemimpinan *de facto* MBS dalam memahami dan bertindak adalah suatu perwujudan dari kepentingan Arab Saudi sebagai suatu aktor.

PEMBAHASAN

Gambaran Kerajaan Saudi Arabia

a. Geografis

Arab Saudi merupakan negara terluas di jazirah Arab, dengan luas wilayah 2.240.350 km² dapat menghubungkan tiga benua; Asia, Afrika dan Eropa dan tiga perairan; Laut Merah, Teluk Aqabah dan Teluk Persia serta di kelilingi negara-negara Arab seperti Iraq, Jordania, Kuwait, Qatar, UEA, Oman, Yaman dan berbatasan laut dengan Bahrain dan Iran di Teluk persia serta berbatasan laut di Laut Merah dengan Mesir, Sudan dan Ethiopia. Dari letak geografis ini, Arab Saudi berada pada persilangan lalulintas dunia dan membuat negara ini sangat strategis (kemlu.go.id, 2018). Dilihat dari garis perbatasan darat dan laut yang sangat panjang. Arab Saudi berbatasan darat dengan tujuh negara dan perairan tiga

negara. Panjang pesisir Arab Saudi dari selatan Yaman menuju teluk Aqabah melewati laut Merah sepanjang 1.800 kilometer. Pada bagian utara dari teluk Aqabah sampai ke teluk Persia melewati negara Yordania, Irak dan Kuwait sepanjang 1.400 kilometer (geografi.org; 2017).

Dari letak geografis tersebut, Arab Saudi berbatasan langsung dengan rival politiknya, yaitu perbatasan darat atau laut. Dengan letak tersebut menyebabkannya harus selalu waspada dan siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan ancaman dan agresi dari rivalnya di kawasan.

b. Demografis

Penduduk Arab Saudi pada tahun 2021 tercatat berjumlah 33.699.947 orang (ms.zhujiworld.com, 2021). Mayoritas penduduk Arab Saudi beragama Islam Sunni dan sekitar 2 - 4 juta menganut paham Syiah atau 10% sampai 11% total penduduk. Penganut Syiah terutama tinggal di wilayah provinsi Timur. Sebagai kelompok minoritas Islam Syiah di Arab Saudi sering mendapat diskriminasi. Puncaknya saat eksekusi mati salah satu ulama Syiah, Nimr al Nimr karena sangat vokal dan kritis untuk memperjuangkan kesetaraan Syiah dan Sunni di Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi menganggap Nimr sebagai teroris. Reaksi di Iran-pun

diwarnai unjuk rasa besar-besaran dengan menduduki Kedutaan Besar Arab Saudi oleh demonstran. Setelah kejadian tersebut Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Sejak eksekusi Nimr tersebut memperlebar jurang yang dalam menuju krisis sektarian antara Sunni dan Syiah di Timur Tengah.

Krisis tersebut berkembang menjadi masalah bagi Arab Saudi yaitu konflik Sunni – Syiah yang menyebabkan terjadinya konflik bersenjata. Konflik tersebut diperparah lagi dengan terlibatnya negara-negara proksi. Negara yang terlibat langsung dalam perang proksi tersebut adalah Arab Saudi di pihak Sunni dan Iran di pihak Syiah (Taufik, 2018). Proksi ini membawa Timur Tengah menjadi terbelah dengan aliansi Arab Saudi dengan dukungan Amerika dan Barat, Aliansi Iran dengan memainkan kelompok-kelompok oposisi diberbagai negara konflik.

c. Bentuk Pemerintahan Arab Saudi

Arab Saudi berdiri pada tanggal 23 September 1932, diproklamasikan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Sa'ud sebagai Kerajaan Saudi Arabia (*Al Mamlakah Al 'Arabiyah Al Su'udiyah*). Kata Saudi sendiri berasal dari keluarga Al Sa'ud atau keluarga raja pertama Raja Abdul Aziz Al Sa'ud. Wilayah Arab Saudi

menyatukan Riyadh, Najd, Hijaz, Asir, dan Ha'a (Hidayat dan Machmudi, 2017).

Sistem pemerintahan menganut monarki absolut yang mana Raja sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan sebagai pengambil keputusan tunggal di Kerajaan. Hukum yang digunakan adalah Hukum Islam yang berfungsi sebagai landasan utama untuk membuat peraturan dan undang-undang kerajaan. Al Qur'an Sunnah dijadikan sebagai konstitusi Kerajaan Arab Saudi.

Posisi strategis kerajaan hampir semua dipegang oleh Raja dan didominasi oleh keluarga kerajaan dan membatasi kegiatan politik bagi rakyatnya. Jabatan politik terpusat kepada Raja, seperti; Kepala Dinasti Sa'ud, Perdana Menteri, Imam Keagamaan Tertinggi, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Kepala Pengadilan.

Pada saat ini Raja Arab Saudi adalah Raja Salman bin Abdul Aziz Al Sa'ud. Raja Salman lahir pada 31 Desember 1935 di Riyadh. Sebelum menjadi Raja, ia menjabat sebagai Gubernur Riyadh yang sukses mengubah Riyadh dari yang berpenduduk 200.000 jiwa menjadi kota kosmopolitan dengan penduduk sebanyak 7 juta jiwa. Raja Salman juga dikenal sebagai sosok yang reformis dan

mempunyai semangat perubahan yang tinggi.

Semangat reformis yang dimiliki Raja Salman diturunkan kepada Putranya yaitu Mohammed bin Salman (MBS). MBS lahir pada 31 Agustus 1985, dan pada tahun 2015 di tunjuk sebagai Menteri pertahanan sampai sekarang. Selanjutnya MBS pada tahun 2017 diangkat sebagai Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi. Dengan jabatan kerajaan yang strategis tersebut sudah dapat dipahami bahwa MBS adalah penguasa *de facto* Arab Saudi saat ini.

Peran Arab Saudi di Kawasan di Bawah Komando Mohammed bin Salman

a. Posisi Mohammed bin Salman di Kerajaan Arab Saudi

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud atau biasa disebut MBS lahir pada 31 Agustus 1985, putra Raja Salman bin Abdulaziz. Sejak raja Salman diangkat sebagai raja Arab Saudi pada 23 Januari 2015, MBS diberikan beberapa jabatan seperti; Ketua Dewan Ekonomi dan Pembangunan (CEDA) yang membawahi beberapa kementerian antara lain; Kehakiman, Keuangan, Perekonomian, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Komunikasi, Kebudayaan, Sosial, dan Pendidikan (SUSRIS, 2015). Di bidang Pertahanan

MBS ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan yang membawahi Angkatan Bersenjata meliputi Angkatan Darat, Laut dan Udara (Henderson, 2015). MBS ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri kedua dan pada tanggal 21 Juni 2017 MBS ditunjuk oleh raja Salman sebagai Putra Mahkota Arab Saudi. Raja Salman juga menunjuk MBS sebagai Kepala Dewan Tertinggi *Supreme Council of the Saudi Arabian Oil Company* (Saudi Aramco) (SUSRIS, 2015). Menurut Forbes, walaupun kekuasaan dijabat oleh Raja Salman bin Abdul Aziz, tetapi secara *de facto* MBS-lah yang lebih banyak mengambil kebijakan-kebijakan politik strategis Arab Saudi (forbes.com, 2018).

Kerajaan Arab Saudi merupakan sebuah negara berbentuk monarki absolut, di mana seorang raja sekaligus menjabat sebagai Perdana Menteri dan Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata (kemlu.go.id; 2015). Sejak berdirinya Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 belum pernah ada seorang putra mahkota memiliki jabatan sebanyak MBS. MBS mempunyai wewenang penuh untuk mengendalikan Angkatan Bersenjata Arab Saudi, contoh nyata yang dilakukan oleh MBS adalah intervensi Arab Saudi dalam konflik Yaman. MBS dapat melakukan perintah serangan maupun menghentikan

serangan sesuai dengan tujuan atau keinginan politik MBS.

b. Kekuatan Militer Arab Saudi

Menurut *Global Firepower* (GFP) pada tahun 2021 Arab Saudi berada pada posisi 17 dari 140 negara dan keempat di kawasan Timur Tengah. Skor *Power Index* 0.3231 Arab Saudi memiliki prajurit aktif sebanyak 480.000 orang dan personel cadangan sebesar 400.000 orang. Kekuatan udara Arab Saudi memiliki 889 pesawat dengan 279 jet tempur dan 50 pesawat angkut. Angkatan darat, Arab Saudi memiliki 1.062 tank serta 12.500 kendaraan tempur lapis baja, 705 Artileri pertahanan/self-propelled, 1.818 Artileri manual, dan 122 peluncur roket/proyektor roket. Sedangkan Angkatan laut Arab Saudi mempunyai 7 kapal frigate, 4 corvet, 9 kapal pengintai, dan memiliki 3 buah pangkalan perang. Arab Saudi mengeluarkan 67,6 miliar dollar AS untuk sektor pertahanan pada tahun 2021. Peta kekuatan militer di Timur Tengah berdasarkan versi *Global Firepower* sesuai ranking posisi pertama ada Turki, Mesir, Iran, Arab Saudi dan Israel. (globalfirepower.com, 2021). Dengan kekuatan persenjataan ini menempatkan Arab Saudi pada ranking empat dunia di sektor kendaraan tempur daratnya. Kekuatan militer Arab Saudi ini sejalan dengan dukungan Kerajaan dengan

mengeluarkan anggaran militer sebesar 67,6 miliar US Dolar pertahunnya atau 10% dari produk domestik bruto Arab Saudi (Tirto.id, 2017).

Sedangkan menurut *Ceoworld* pada tahun 2021, Arab Saudi menempati peringkat ke 11 dari 179 negara, sebagai militer terkuat di dunia dan pertama di kawasan Timur Tengah dan Islam dengan skor 86.15. Peringkat pertama diduduki Amerika Serikat, China, Rusia, India, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, Korea Selatan dan Israel. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian dari *Ceoworld* adalah stabilitas politik, dampak ekonomi, anggaran pertahanan, senjata negara, aliansi ilmiah, kekuatan militer, dan pengaruh global. (ceoworld.biz, 2021)

Dengan kepercayaan diri yang besar sebagai sebuah negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang terkuat di kawasan, Arab Saudi seolah menjadi aktor utama dalam setiap persaingan regional. Kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Arab Saudi sangat mendukung untuk terus meningkatkan kemampuan pertahanan yang modern dengan teknologi militer tinggi. Kekuatan militer merupakan modal bagi Arab Saudi untuk melakukan segala upaya mempertahankan dan melindungi eksistensi Kerajaan dan dalam persaingan regional yang semakin panas.

Keterlibatan militer Arab Saudi dalam beberapa konflik di kawasan Timur Tengah tidak terlepas dari dukungan Amerika Serikat sebagai pemasok utama persenjataan ke Arab Saudi. Dari 37% ekspor senjata global, hampir setengah atau 47% ekspor senjata Amerika Serikat ditujukan ke negara-negara Timur Tengah, dan 24% ke Arab Saudi. Suplai senjata Amerika Serikat yang sangat besar ke Arab Saudi memungkinkan negara ini menjadi kekuatan yang cukup besar di kawasan Timur Tengah. Selain dukungan persenjataan yang mutakhir bagi Arab Saudi, Amerika Serikat juga memberikan dukungan secara politik di kawasan. Hampir semua kebijakan militer Arab Saudi diikuti dukungan militer dan politik oleh Amerika Serikat, seperti pada konflik di Suriah, dan Yaman serta perang dingin dengan Iran. Dengan modal ini Arab Saudi merasa sangat percaya diri untuk menancapkan hegemoninya di kawasan Timur Tengah.

c. Konflik Kawasan

1) Konflik Yaman

Konflik di Yaman yang dimulai sejak tahun 2014 antara pemerintah Yaman dengan pemberontak Houthi untuk memperebutkan kekuasaan di negara tersebut. Pada tahun 2015 Arab Saudi dan delapan negara koalisi Arab didukung

Amerika Serikat, Inggris dan Prancis memulai serangan udara terhadap pemberontak Houthi untuk membantu pihak pemerintah Yaman. Pertempuran selama tujuh tahun tersebut mengakibatkan lebih dari 230.000 penduduk Yaman tewas dan jutaan lainnya mengalami kelaparan serta dinyatakan oleh PBB sebagai bencana kemanusiaan terburuk saat ini, dengan 80% populasi membutuhkan bantuan dan perlindungan. Sedangkan konflik sampai saat ini belum selesai dan kelompok pemberontak Houthi semakin kuat dalam pendudukannya di Yaman. Sedangkan pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi dan koalisinya belum berhasil mengalahkan Houthi.

Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat ternyata mengakhiri dukungan Amerika Serikat untuk operasi ofensif Arab Saudi dan aliansinya terhadap kelompok Houthi di Yaman. Dalam pidato pertamanya tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan perang di Yaman harus diakhiri, hal ini tentu saja akan meningkatkan tekanan terhadap monarki di Arab Saudi. Bisa dikatakan bahwa “Arab Saudi telah kalah dalam perang di Yaman”, sedangkan Houthi semakin kuat dengan meluasnya kekuasaan mereka dan

stabil dengan dukungan Iran sejak berlangsungnya konflik pada tahun 2016.

Keseriusan kebijakan Joe Biden terhadap konflik di Yaman yaitu pada bulan September 2021, Amerika Serikat mulai menarik sistem pertahanan udara, *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) dan baterai antimisil patriot canggihnya dari Arab Saudi. Hal ini sebagai realisasi kebijakan dari Joe Biden terhadap Arab Saudi dalam konflik di Yaman. Penarikan sistem pertahanan udara AS tersebut bertujuan digunakan untuk menghadapi “konflik kekuatan besar” dengan China dan Rusia (international.sindonews.com, 2021). Penarikan sistem pertahanan udara AS tersebut tentu sangat berdampak bagi keamanan teritori dan obyek vital Arab Saudi di tengah gencarnya serangan-serangan rudal dan drone oleh Houthi. Serangan yang dilakukan oleh Houthi tersebut menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan obyek vital kilang minyak Aramco di Jeddah dan Jubail serta mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi Arab Saudi.

Penyelesaian pada konflik di Yaman sebagai jalan keluar terbaik bagi Arab Saudi saat ini dengan mengajukan proposal damai untuk mengakhiri perang di Yaman. Hal itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran

Faisal bin Farhan, bahwa Arab Saudi menghendaki penghentian kekerasan senjata yang terus berlangsung, pembukaan kembali bandar udara di Sana'a untuk pendistribusian bantuan logistik, membuka blokade pelabuhan Hudaydah di bagian barat untuk kegiatan ekspor-impor. Pihak Houthi mengatakan bahwa tidak ada yang baru dari tawaran yang diberikan oleh Arab Saudi tersebut, yang diinginkan oleh pihak Houthi yang diwakili oleh Kepala negosiator Mohammed Abdul Salam adalah syarat militer atau politik yaitu membuka sepenuhnya blokade atas bandara di ibukota Yaman San'a dan pelabuhan Hudaydah di bagian barat yaman (liputan6.com, 2021).

2) Konflik Suriah

Dalam konflik Suriah sangat nyata adanya perang proksi dan rivalitas antar beberapa negara, sehingga menyebabkan rumitnya penyelesaian atas konflik yang berkepanjangan tersebut. Negara-negara proksi seperti Rusia, China dan Iran mendukung rezim Bashar al-Asaad dengan memberikan dana dan persenjataan. Di pihak oposisi atau pemberontak didukung oleh Arab Saudi, Qatar, Turki, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Negara-negara proksi inilah yang membuat konflik di Suriah semakin tidak menentu.

Arab Saudi sebagai pendukung utama kelompok oposisi, dukungan tersebut berupa bantuan dana, senjata dan alat-alat berat. Kelompok oposisi yang memberontak terhadap rezim Bashar Al-Asaad yang didukung Arab Saudi adalah *Free Syrian Army* (FSA). FSA mendapat dukungan kendaraan lapis baja, senapan mesin otomatis, rudal anti tank buatan Amerika Serikat dan peralatan tempur lainnya serta keuangan.

Dalam dukungan pada kelompok oposisi terbagi dua kubu yang berseberangan yaitu pro *Muslim Brotherhood* (Qatar dan Turki) dan anti *Muslim Brotherhood* (Arab Saudi). Perbedaan dukungan ini menyebabkan permasalahan bagi Barat untuk memberikan dukungan yang lebih besar karena di Suriah terdapat ketidakstabilan dan polarisasi yang memberikan peluang bagi kelompok radikal dan ekstremis. Permasalahan lain bagi Arab Saudi yaitu kurangnya memahami penduduk, medan tempur dan dalam hal operasi intelijen di Suriah. (Tan dan Perudin, 2019)

Melihat *show of force* yang dilakukan Iran, Turki dan Rusia di Suriah, maka posisi Arab Saudi dalam proksinya terhadap kelompok oposisi semakin sulit untuk dimenangkan. Penyelesaian konflik di Suriah hanya dapat diselesaikan dengan solusi politik antara kekuatan internal dan

eksternal. Kekuatan internal antara rezim dengan pihak oposisi dan pihak eksternal antara negara-negara proksi. Bila kekuatan-kekuatan ini dapat menemukan solusi politik yang terbaik untuk menyelesaikan konflik di Suriah, maka perdamaian di Suriah dapat terwujud.

MBS sendiri dalam masalah ini akhirnya ingin menormalisasi hubungan dengan Bashar al Assaad, MBS mengatakan bahwa “waktu telah berubah, *Arab Spring* adalah sejarah masa lalu, dan wilayah ini sedang bertransisi menuju masa depan yang baru”, seperti dikutip dari al Jazeera, 9 Juni 2021. (prsoloraya.pikiran-rakyat.com, 2021) MBS selaku menteri pertahanan tentu akan menentukan arah kebijakan militernya. Karena dampak yang ditimbulkan bila konflik ini terus berlarut maka konsekuensinya adalah bertambahnya pengeluaran biaya militer bagi Arab Saudi dan juga berdampak pada sektor lainnya. Selain itu MBS juga melihat peluang koridor kekuasaan rezim Assaad sebagai jalan untuk menopang kepentingan regional Arab Saudi yang lebih luas terutama kepentingan ekonomi Arab Saudi. Kepentingan ekonomi Arab Saudi di Suriah adalah sebagai penghubung bagi pipanisasi minyaknya sampai ke laut Mediterania untuk tujuan Eropa dan Afrika agar menghemat biaya pengiriman.

d. Rivalitas Arab Saudi dan Iran

Rivalitas regional antara Arab Saudi dan Iran sudah sejak lama terjadi, hal ini memunculkan kontestasi kekuatan yang melahirkan konflik kawasan regional yang tidak kunjung selesai sampai saat ini. Sejak terjadinya Revolusi Islam Iran tahun 1979, hubungan Arab Saudi dan Iran mulai kurang baik dan sering berseberangan dalam pandangan politik dan cenderung bermusuhan. Revolusi Iran itu merubah Iran dari Monarki pimpinan Shah Mohammad Reza Pahlevi menjadi Republik Islam Iran dan Ayatullah Agung Rohullah Khomeini menjadi pemimpin spritual tertinggi. Menurut Khomeini, bentuk monarki tidak sesuai dengan konsep negara Islam, sedangkan Arab Saudi berbentuk monarki yang dipimpin oleh raja yang konservatif (tirto.id, 2019). Arab Saudi dan Iran sering berhadapan secara politik dan menyuarakan argumen politik berbeda dan sering saling bertolak belakang seperti masalah di Yaman, Suriah, Libya, Bahrain, dan Qatar. Perbedaan dukungan terhadap negara-negara tersebut melahirkan rivalitas yang makin memanas dan melahirkan kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan militer serta menciptakan medan-medan tempur baru dan semakin meluas.

Pasca meletusnya *Arab Spring*, Arab Saudi dan Iran terlibat dalam perang proksi

dan terkulminasi dalam sejumlah perang di kawasan Timur Tengah. Dalam perang proksi antara Arab Saudi dan Iran mengakibatkan Timur Tengah terbelah menjadi dua kubu, dan sebagian besar negara-negara Timur Tengah mendukung Arab Saudi pimpinan Mohammed bin Salman. Dengan demikian Arab Saudi dan Iran adalah aktor kunci dalam beberapa konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan menjadi aktor utama dalam perimbangan kekuatan (*balance of power*) dalam tujuan mencapai hegemoni regional.

Perang proksi di kawasan Timur Tengah pasca Arab Spring, yang melibatkan Arab Saudi dan Iran, seperti; di Suriah, Arab Saudi hadir untuk mendukung kelompok oposisi sedangkan Iran mendukung rezim Bashar al-Assad. Di Yaman, Arab Saudi mengirimkan pasukan untuk menggempur militan Houthi, sedangkan Iran mendukung Houthi dengan mengirim persenjataan. Di Lebanon Arab Saudi berupaya meredam pengaruh Hizbullah yang didukung oleh Iran. Di Irak ke dua negara berebut pengaruh, sebelumnya Sunni memegang kendali kekuasaan di bawah rezim Saddam Husien dan sekarang beralih Syiah yang memegang kendali kekuasaan, walaupun sekarang ada perjanjian tidak resmi dalam pejabat pemerintahan di Irak, untuk presiden dijabat seorang Kurdi, Perdana

Menteri seorang Syiah, dan Ketua Parlemen dari Sunni.

Menurut lembaga yang mengamati masalah militer *International Institute for Strategic Studies* (IISS) melaporkan bahwa saat ini Iran mempunyai keunggulan militer lebih efektif dari pada Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Studi IISS selama 1,4 tahun yang disebut "*Iran's Networks of Influence*" menyatakan bahwa bagi Iran kekuatan jaringan pihak ketiga yaitu milisi Syiah dan kelompok pemberotak lebih penting dari pada program misil balistik, dugaan program senjata nuklir ataupun pasukan militer konvensional. Kesimpulan dari IISS bahwa dalam salah satu penilaian (*assessment*) paling rinci tentang strategi dan doktrin Iran di seluruh Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman "kemampuan pihak ketiga" yang didukung Iran telah menjadi senjata pilihan Teheran. Kemampuan ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di kawasan serta tidak ada negara yang seaktif atau seefektif Iran dalam konflik regional di zaman modern ini. (international.sindonews.com, 2021).

Menyadari kekuatan militer dan strategi yang diterapkan Iran di kawasan, ditambah dukungan koalisi Iran yang semakin solid. Melihat realitas dalam perang proksi antara Arab Saudi dan Iran selalu dimenangkan oleh Iran, maka MBS

dengan diplomasi pertahanan yang realistis tentu tidak akan berlama-lama dalam situasi seperti ini. Membandingkan loyalitas sekutu utama Arab Saudi yaitu Amerika Serikat tidak lagi sepenuhnya mendukung kebijakan MBS, maka arah kebijakan MBS pun mengalami perubahan. MBS mengatakan bahwa Arab Saudi berharap menjalin hubungan yang baik dan terhormat dengan Iran sebagai negara tetangga. Arab Saudi juga ingin Iran yang sejahtera dan memiliki kepentingan bersama satu sama lain. Masalah yang ada bagi Arab Saudi adalah program nuklir dan program rudal balistik yang dimiliki Iran serta dukungan Iran terhadap milisi-milisi terlarang di kawasan Timur tengah (nu.or.id, 2021). Dengan pernyataan MBS ini maka normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran akan segera tercapai dengan mediasi pihak ketiga yaitu Irak.

Dibalik kontestasi kedua negara ini di kawasan Timur Tengah, sebenarnya kedua negara mempunyai kepentingan dan kerja sama yang dapat dibangun melalui diplomasi yang kuat dan komunikasi yang intens. Kepentingan tersebut meliputi; kepentingan ekonomi dan politik, sekte dan ideologi, dan militer (Taufik F, 2018).

Perubahan kebijakan yang signifikan yang diambil oleh MBS terhadap Iran ini tidak terlepas dari isyarat perubahan

pendekatan Amerika Serikat terhadap Iran dan MBS sangat realistis terhadap akhir dari drama politik ini. Selanjutnya MBS pun berpacu dengan waktu dalam menghadapi program-program Visi Saudi 2030. Tentu prioritas MBS sekarang adalah misi besarnya yaitu kesuksesan mengejar Visi Saudi 2030 bukan lagi persaingan dengan Iran.

e. Kebijakan Politik dan Militer Arab Saudi dengan Negara-negara Besar Dunia

1) Kebijakan Hubungan Politik dan Militer dengan Turki

Hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Turki sudah sejak lama mengalami pasang surut, mengingat sejarah yang panjang antar kedua negara. Kemunduran hubungan kedua negara mengemuka pasca gelombang politik Arab Spring 2011, terkait dukungan Turki terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sedangkan Arab Saudi dan sekutunya mendeklarasikan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah organisasi Teroris (tribunnews.com, 2021). Pada tahun 2017, Turki mendukung utama Qatar sejak Arab Saudi, Bahrain Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar. Pada tahun 2018 hubungan Arab Saudi dan Turki merenggang sejak kasus pembunuhan jurnalis senior Arab Saudi

Jamal Khashoggi di Konsulat Arab Saudi Istanbul Turki. Turki menduga pembunuhan Khashoggi melibatkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan mendesak agar para pelaku segera diadili dan diberikan hukuman. Di sisi lain, Arab Saudi menyuarkan warganya untuk memboikot seluruh barang buatan Turki dan seruan itu didukung oleh warga negara Saudi. Aksi boikot tersebut berhasil memotong nilai perdagangan antar kedua sampai 98% (internasional.kontan.co.id, 2021).

Perseteruan Arab Saudi dan Turki terus berlanjut dalam konflik di Libya, di mana Pemerintah Turki mengerahkan pasukan ke Libya guna mendukung Pemerintahan GNA pimpinan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj untuk mengamankan kepentingan Turki di laut Mediterania. Di lain pihak, Arab Saudi mendukung pasukan pemberontak pimpinan Khalifa Haftar, dan menurut Arab Saudi manuver Turki ini sangat berbahaya bagi stabilitas kawasan dan melanggar hukum internasional. Namun persaingan antara Arab Saudi dan Turki di Libya memulai babak baru dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, ke Arab Saudi guna membahas pemulihan hubungan diplomatik antara Turki dan Arab Saudi.

Dengan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Turki atas beberapa masalah yang dapat diselesaikan seperti Qatar, Libya dan kasus pembunuhan Kashogi akan berdampak yang positif bagi kedua negara. Arab Saudi juga memiliki perjanjian transfer teknologi dengan perusahaan Vestel milik swasta di Turki yang memungkinkan Arab Saudi memproduksi drone tempur sendiri. Spekulasi yang dilakukan Arab Saudi ini untuk mencari sumber produk senjata baru untuk menghindari embargo yang diberlakukan oleh beberapa negara Barat terhadap Arab Saudi karena keterlibatannya dalam konflik di Yaman. Sehingga pilihan Arab Saudi dengan membuka kembali hubungan kerja sama dengan Turki setelah beberapa lama renggang dapat meningkatkan teknologi militer yang dapat menguntungkan Arab Saudi. (cybertvnews.com, 2021)

2) Kebijakan Hubungan Politik dan Militer dengan Rusia

Hubungan Arab Saudi dan Rusia tidaklah sebaik dan seerat hubungan antar Arab Saudi dan Amerika Serikat terutama dalam bidang militer. Tetapi dengan melihat dinamika politik yang ada Arab Saudi memandang penting untuk bekerjasama dengan Rusia sebagai negara utama persaingan militer dunia. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Rusia,

Vladimir Putin berkunjung ke Riyadh Arab Saudi, disambut oleh Raja Salman dan Pangeran Mohammed bin Salman. Dalam kunjungan ini Vladimir Putin dan Raja Salman membicarakan lebih dari 20 kesepakatan bilateral senilai US\$ 2 milyar (Rp. 28.3 triliun). Dalam kunjungan ini Vladimir Putin membawa delegasi Rusia terdiri dari pejabat perdagangan, pejabat keamanan dan pertahanan.

Bidang pertahanan yang dibicarakan tentang undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar Rusia berpartisipasi untuk menyelidiki kerusakan fasilitas kilang Arab Saudi yang disebabkan serangan rudal dan drone pada tanggal 14 September 2019. Selain itu pada bidang pertahanan dibicarakan kemungkinan pembelian dan penempatan sistem pertahanan udara S-400, seperti yang dilakukan oleh Turki.

Pada tanggal 28 Agustus 2021 Arab Saudi menandatangani perjanjian pengembangan kerja sama militer dengan Rusia. Kerja sama militer tersebut telah ditandatangani oleh wakil menteri pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman dan wakil menteri pertahanan Rusia Alexander Fomin. Kerja sama militer tersebut berupa meningkatkan kerja sama militer kedua negara dalam upaya menjaga stabilitas keamanan kawasan serta melihat tantangan bersama yang dihadapi bersama (minanews.net, 2021).

3) Kebijakan Hubungan Politik dan Militer dengan China

Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan China tidak sebatas ekonomi akan tetapi meliputi kerjasama pertahanan juga. Arab Saudi dan China telah mengadakan perjanjian kerjasama nuklir sesuai rencana besar Arab Saudi untuk mengembangkan nuklir dan mengekstrak uranium di dalam negeri serta swasembada bahan bakar nuklir. Memanfaatkan ahli geologi dari China, Arab Saudi menghasilkan 90.000 ton uranium yang dapat diproduksi dari tiga endapan utama di tengah dan barat laut Arab Saudi, sebagian besar cadangan uranium berada dekat dengan kota Neom yang menjadi inti dari proyek Visi Saudi 2030. Dengan demikian Arab Saudi bisa memiliki cadangan uranium yang cukup bahkan surplus untuk bahan bakar sejumlah reaktor nuklir. Kerjasama antara Survei Geologi Arab Saudi dan Institut Penelitian Geologi Uranium Beijing (BRIUG) dan Perusahaan Nuklir Nasional China (CNNC). MBS mengatakan pengayaan uranium ini menjadi poin penting bagi Kerajaan Arab Saudi sebagai mayoritas muslim Sunni dalam pengembangan program nuklir untuk tujuan pembuatan senjata nuklir jika saingan terdekatnya di kawasan regional yaitu Iran yang mayoritas muslim Syiah juga

mengembangkannya (zonajakarta.pikiran-rakyat.com, 2021).

Dengan kerja sama ini memungkinkan Arab Saudi mengembangkan dan memiliki senjata nuklir menyaingi “dugaan” bahwa Iran juga memiliki senjata nuklir dengan tujuan perang. Selain tujuan persaingan di kawasan Arab Saudi juga dapat mengembangkan energi nuklirnya untuk keperluan senjata nuklir dan keperluan industrinya. Dengan adanya energi nuklir ini tentu akan sangat menguntungkan bagi Arab Saudi, untuk mendukung kebutuhan energi kota Neom sebagai inti dari proyek Visi Saudi 2030.

f. Kebijakan Militer Arab Saudi di Kawasan

1) Kebijakan Militer Arab Saudi di Kawasan

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Arab Saudi di kawasan regional yang selalu bersinggungan dengan negara-negara tetangganya, terutama dalam hal stabilitas kawasan. Kompetisi persaingan regional membuat negara-negara di Timur Tengah berlomba-lomba meningkatkan kemampuan pertahanan terutama pengadaan alat persenjataan yang paling canggih dan modern dari Amerika Serikat, Rusia dan Prancis. Persaingan di kawasan ini menyebabkan sebaran ekspor senjata negara-negara tersebut sebagian besar

tertuju ke Timur Tengah yang mencapai 47 % dari ekspor keseluruhan dunia. Menurut laporan *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), sejak tahun 2016 – 2020 Arab Saudi merupakan negara importir terbesar di dunia dengan nilai 16,1 milyar US Dolar. Besaran tersebut mencapai 11 % dari impor persenjataan dunia (sipri.org, 2021).

Bagi Arab Saudi pengadaan persenjataan yang canggih dan modern tersebut adalah untuk pertahanan dan keamanan dalam negeri serta untuk persaingan pada perang proksi di daerah konflik regional. Ancaman paling nyata yang dihadapi Arab Saudi adalah berkembangnya kemampuan Iran dalam pengadaan peralatan militernya. Selain itu program nuklir Iran merupakan ancaman nyata bagi Arab Saudi. Kekuatan militer Iran paling ditakuti di kawasan regional dengan kemampuan sesuai doktrin militernya yaitu senjata rudal balistik ekspansif, kekuatan angkatan laut yang mampu bertempur di laut secara asimetris, dan mempunyai hubungan dengan non-negara dengan kelompok militan.

Iran adalah negara kompetitor Arab Saudi yang paling aktif untuk memperebutkan hegemoni kawasan di Timur Tengah dan juga menjadi kekuatan penyeimbang (*balance of power*) di kawasan atas perang proksi di bawah

dominasi Arab Saudi yang didukung Amerika Serikat. Kebijakan MBS yang melibatkan Arab Saudi dalam konflik regional di Suriah, Yaman, Libya, Iraq, Bahrain, dan Qatar terbukti tidak sesuai harapan karena terganjal dengan keaktifan dan efektifnya proksi yang dilakukan Iran dalam konflik regional di Timur Tengah. Bila MBS tetap bertahan dalam situasi yang tak ada titik temu dan tak kunjung berkahir, maka Arab Saudi harus siap dengan konsekuensi yang lebih parah atau kekalahan dan kerugian yang lebih besar.

Setelah terpilihnya Biden menjadi Presiden Amerika, terjadi perubahan kebijakan yang sangat tajam tentang konflik di Yaman yaitu AS berhenti memberikan dukungan terhadap koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi. Kebijakan Amerika Serikat untuk tidak lagi mendukung Arab Saudi dalam konflik di Yaman mempengaruhi sikap politik dan kebijakan militer MBS terhadap negara-negara kawasan yang selama ini tidak sejalan dengan Arab Saudi. Setelah ditinggal Amerika Serikat, MBS merubah irama politiknya dengan beberapa perubahan kebijakan seperti mengurangi intensitas ketegangan dengan kelompok Houthi di Yaman dengan mengajukan usulan untuk gencatan senjata dengan kelompok Houthi, rencana normalisasi hubungan dengan Iran, mencabut boikot

terhadap Qatar dan normalisasi hubungan dengan Turki. Sebagai Menteri Pertahanan, MBS dapat memainkan kebijakan politik Arab Saudi sesuai dengan dinamika yang terjadi di kawasan. Perubahan sikap dan kebijakan MBS terhadap arah politik Arab Saudi juga diikuti oleh arah kebijakan militernya. Ketergantungan Arab Saudi terhadap Amerika Serikat akan peralatan pertahanan dialihkan dengan kemandirian akan teknologi pertahanan dalam negeri dan mulai melirik untuk beralih mendatangkan alat-alat militer dari China, Turki dan Rusia.

Dengan kebijakan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah sebagai sekutu dekat Arab Saudi, yang tidak lagi sepenuhnya membela kepentingan Arab Saudi, membuat MBS melunak terhadap negara-negara pesaing di kawasan. MBS menyadari dukungan Amerika Serikat terhadap kebijakan-kebijakan Arab Saudi tidak pernah abadi, saatnya bagi MBS tidak lagi terlalu berharap banyak pada AS dan mengadakan normalisasi dan kerja sama dengan negara pesaing terdekatnya yaitu Iran dan Turki. Karena Arab Saudi, sadar bahwa rivalitasnya di kawasan adalah Iran dan Turki. Arab Saudi, Iran dan Turki adalah aktor utama dalam menciptakan stabilitas maupun konflik di kawasan Timur Tengah. Ketiga negara

tersebut masing-masing memiliki pengaruh yang sangat besar dan berebut untuk menciptakan hegemoninya di kawasan. Dari ketiga negara tersebut sepertinya Arab Saudi memilih untuk tidak seirama dalam kebijakan politiknya yang cenderung pro Amerika dan Barat. Arab Saudi juga sering berbeda bahkan bertolak belakang dengan kebijakan politik Iran dan Turki sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan dan memanasnya hubungan antara kedua negara. Contohnya pada konflik di Suriah dan Yaman, keduanya saling berhadapan dalam memainkan perang proksi.

Stabilitas di kawasan Timur Tengah sangat mempengaruhi Visi Saudi 2030, karena peran aktif Arab Saudi sebagai aktor utama dalam perebutan hegemoni regional. Bila Arab Saudi menarik diri dari konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan dilanjutkan dengan upaya maksimal untuk perdamaian maka stabilitas kawasan akan sangat mungkin terjadi. Upaya damai atau normalisasi Arab Saudi terhadap negara-negara rivalitasnya akan sangat mempengaruhi kondisi politik di kawasan. Iran, Turki dan Qatar sangat membuka diri terhadap upaya-upaya pihak ketiga maupun inisiatif dari Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan terhadap negara-negara tersebut. Dengan normalisasi hubungan dengan

rivalitas Arab Saudi di kawasan dan stabilitas regional tentu akan berdampak positif bagi perkembangan visi Saudi 2030.

2) Kemandirian Teknologi Militer

Model kemandirian pertahanan dapat diukur dari kemampuan sebuah negara untuk memiliki dan memenuhi minimal 70% dari kapasitas teknologi, finansial, dan produksi sistem senjata dalam negeri. Negara-negara kompetitor Arab Saudi di kawasan seperti Iran dan Turki berlomba-lomba untuk mengembangkan kemampuan inovasi dan kemandirian teknologi militer untuk tidak tergantung kepada salah satu negara. Bila sebuah negara sudah tergantung dengan persenjataan sebuah negara maka negara pengguna (pemakai) akan selalu membutuhkan suku cadang (spare part) dari negara pembuat.

Industri Militer Arab Saudi (SAMI) didirikan pada tahun 2017 untuk memangkas ketergantungannya pada senjata impor dan sistem militer. Arab Saudi telah membangun industri militernya dengan menginvestasikan dana sebesar US\$ 20 miliar (Rp. 281 triliun) agar tidak tergantung dengan pihak luar dan memproduksi senapan serbu, amunisi, bahan peledak militer, peralatan militer, peralatan militer individu, dan elektronik

militer. Dengan kebijakan memproduksi alat pertahanan di dalam negeri termasuk suku cadang dan industri militer lainnya Arab Saudi dapat menghemat anggaran sampai 50% atau sekitar Rp. 120 triliun. Pengembangan industri militer dalam negeri Arab Saudi sesuai dengan Visi Saudi 2030 (sami.com.sa, 2021).

Negara-negara yang kuat wajib memiliki kemandirian teknologi militer seperti Amerika Serikat, China dan Rusia yang dapat memproduksi sendiri kebutuhan militernya tanpa tergantung dengan negara lain. Kekuatan militer sebuah negara diperlukan untuk *Deterrent Effect* (daya tangkis atau daya gentar), terhadap negara agresor untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara.

KESIMPULAN

Dari rangkaian kejadian politik di Timur Tengah yang melibatkan Arab Saudi baik langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi arah kebijakan militer Arab Saudi, sesuai dengan dinamika yang terjadi di kawasan. Kebijakan yang diambil oleh MBS terhadap sikap militer Arab Saudi di kawasan akan sangat berpengaruh terhadap ambisi besar MBS, dalam menjalankan program-program Visi Saudi 2030. Selain faktor pengeluaran anggaran keuangan yang sangat besar nama baik MBS-pun dipertaruhkan bila kebijakan-kebijakan militer di kawasan

dapat merugikan Arab Saudi. Prioritas terbesar dari MBS sekarang adalah suksesnya program-program Visi Saudi 2030.

Demikian pula dengan kebijakan AS di kawasan Timur Tengah di bawah Presiden Joe Biden sebagai sekutu dekat Arab Saudi membuat MBS melunak dan merubah irama politiknya terhadap negara-negara pesaing di kawasan, terutama terhadap Iran, karena terganjal dengan keaktifan dan efektifnya proksi yang dilakukan Iran dalam konflik regional di Timur Tengah. MBS menyadari dukungan Amerika Serikat terhadap kebijakan-kebijakan Arab Saudi tidak pernah abadi, saatnya bagi MBS tidak lagi terlalu bergantung terhadap AS dan mengadakan normalisasi dan kerjasama dengan negara pesaingnya yaitu Iran dan Turki. Karena Arab Saudi, Iran dan Turki adalah aktor utama dalam menciptakan stabilitas kawasan serta menjadi parameter penentu dalam perjalanan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan militer di kawasan Timur Tengah.

Sebagai Menteri Pertahanan, MBS dapat merubah sikap politik Arab Saudi sesuai dengan dinamika yang terjadi di kawasan. Perubahan sikap dan kebijakan MBS terhadap arah politik Arab Saudi juga diikuti oleh arah kebijakan militernya. Ketergantungan Arab Saudi terhadap

Amerika Serikat akan teknologi pertahanan dialihkan dengan kemandirian akan teknologi pertahanan dalam negeri dan mulai melirik untuk mengimpor alat-alat militer dari Rusia, Turki dan China yang dapat bersaing dengan produk-produk pertahanan dari Amerika Serikat dan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. (Dimaswids, Ed.) Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Foreign Policy Analysis.
- Breuning, M. (2020, September 7). *University of North Texas, "Marijke Breuning,"*. Retrieved from <https://politicalscience.unt.edu/people/marijke-breuning>.
- Ceoworld.biz. (2021, Agustus 28). *the-worlds-most-powerful-countries-for-2021-ranked*. Retrieved from <https://ceoworld.biz>.
- Creswell, J. W. (2012). *Education Research*. New York: Pearson.
- Cybertvnews.com. (2021, April). *menteri-luar-negeri-turki-mevlut-cavusoglu-kunjungi-arab-saudi*. Retrieved from <https://cybertvnews.com>.
- forbes. (2018). *profil mohammed bin salman al saud*. Retrieved from <https://www.forbes.com/profile/moh>

- ammed-bin-salman-al-saud/?sh=6d718998a294.
- globalfirepower.com. (2021, September 14). *country-military-strength-detail*. Retrieved from <https://www.globalfirepower.com>.
- geografi.org; 2017. geografi kerajaan arab saudi. Retrieved from <https://www.geografi.org/2017/10/geografi-kerajaan-arab-saudi.html>.
- https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-20212021. (2021, Februari). *info_singkat/Info%20Singkat-XIII-3-I-P3DI*. Retrieved from <https://berkas.dpr.go.id/puslit/files>.
- Indonesia, K. L. (2018, Februari 3). *Profil Negara Kerajaan Arab Saudi*. Retrieved from <https://www.kemlu.go.id/riyadh/id>.
- internasional.kontan.co.id. (2021, Mei 5). *erdogan-dan-raja-salman-adakan-diskusi-untuk-perbaiki-hubungan-bilateral*. Retrieved from <https://www.internasional.kontan.co.id/news>.
- internasional.kontan.co.id. (2021). *erdogan-dan-raja-salman-adakan-diskusi-untuk-perbaiki-hubungan-bilateral*. Retrieved from <https://internasional.kontan.co.id/news>.
- international.sindonews.com. (2019, November 8). *https://www.international.sindonews.ciiss-iran-memiliki-keunggulan-militer-atas-as-dan-sekutunya*. Retrieved from <https://www.international.sindonews.com/berita>.
- kemlu.go.id. (2018). *Kerajaan Arab Saudi*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/riyadh/id/read/kerajaan-arab-saudi/2782/etc-menu>.
- Kim Hua, T., Perudin, & Alirupendi. (2019). *The "Geopolitical" Factor in the Syrian Civil War: A Corpus-Based Thematic Analysis*. Jakarta: Based Thematic Analysis.
- kompas.id. (2019, Agustus 24). *rivalitas-klasik-arab-saudi-dan-iran*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/opini>.
- liputan6.com. (2021, September 23). *arab-saudi-tawarkan-opsi-damai-ke-houthi-untuk-akhiri-perang-6-tahun-di-yaman*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/global/read>.
- medcom.id. (2021). *visi-2030-dan-keterbukaan-arab-saudi*. Retrieved from <https://www.medcom.id>.
- mediaindonesia.com. (2021). *Dinamika Timur Tengah di Bawah Biden*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/opini/378389/dinamika-timur-tengah-di-bawah-biden>.
- minanews.net. (2021, September 2). *saudi-rusia-jalin-kerjasama-militer*. Retrieved from Saudi Rusia jalin kerjasama militer <https://minanews.net>.
- ms.zhujiworld.com. (2021). *Arab Saudi Statistik*. Retrieved from <https://ms.zhujiworld.com/sa/>.
- nu.or.id. (2021, September 9). *putra-mahkota-arab-saudi-iran-tetangga*. Retrieved from <https://www.nu.or.id/post/read>.
- prsoloraya.pikiran-rakyat.com. (2021, Juli 2). *mulai-jalin-hubungan-arab-saudi-dalam-pembahasan-*

- normalisasi-diplomatik-dengan-suriah?* . Retrieved from <https://www.prsoloraya.pikiran-rakyat.com/internasional>.
- Hidayat, R. & Machmudi, Y. (2017). *Perubahan Sosial Politik Di Arab Saudi 1932-1975*. Jurnal Middle East And Islamic Studies, Volume 4 No. 1 Januari – Juni 2017. Jakarta, Jurnal MEIS.
- SAMI. (2021, Juli 17). *SAMI, FIGEAC AÉRO, and Dussur launch joint venture to manufacture aerostructure components*. Retrieved from <https://sami.com.sa/en/media-center/news/>.
- sindonews.com. (2021, September 11). *As tarik rudal patriot dari arab saudi di tengah serangan houthi*. Retrieved from <https://international.sindonews.com>
- sipri.org. (2021). *International arms transfers level off after years of sharp growth; Middle Eastern arms imports grow most, says SIPRI*. <https://www.sipri.org/media/press-release/2021/international-arms-transfers-level-after-years-sharp-growth-middle-eastern-arms-imports-grow-most>.
- susris.com. (2017, Juli 14). *council-for-economic-and-development-affairs-ceda*. Retrieved from <http://susris.com/glossary>.
- syndicate.org., p. /.-a.-v.-2.-c. (2016, Mei). *project.syndicate.org.2016* [/commentary/saudi-arabia-vision-2030-could-inspire-region-by-mohamed-a-el-erian-saudi-arabia-vision-2030-could-inspire-region-by-mohamed-a-el-erian-2016-05/indonesian](https://www.project-syndicate.org/commentary/saudi-arabia-vision-2030-could-inspire-region-by-mohamed-a-el-erian-saudi-arabia-vision-2030-could-inspire-region-by-mohamed-a-el-erian-2016-05/indonesian) . Retrieved from <https://www.project-syndicate.org>.
- tirto.id. (2017, Mei 10). *jejak-permusuhan-iran-dan-arab-saudi-couS*. Retrieved from <https://www.tirto.id>.
- Taufik. F. (2018). *Arah Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Kontestasi Iran dan Arab Saudi*. Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 5 No. 1 Januari – Juni 2018. Jakarta, Jurnal MEIS UI.
- tirto.id. (2019). *kekuatan-militer-arab-saudi-2019-persenjataan-hingga-sumber-daya*. Retrieved from <https://tirto.id>.
- tribunnews.com. (2021, Januari 26). *Donald trump tak lagi berkuasa turki - saudi segera mesra kembali?* Retrieved from [m.tribunnews.com/internasional](https://www.tribunnews.com/internasional).
- zonajakarta.pikiran-rakyat.com. (2021, Juli 22). *negara-barat-was-was-raja-salman-gandeng-china-kembangkan-senjata-nuklir-untuk-militer-arab-saudi?* Retrieved from <https://zonajakarta.pikiran-rakyat.com/internasional>.